

**PELAKSANAAN TUGAS PANITERA DALAM PEMBERIAN
AKTA CERAH DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
(Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum**



Oleh

**KHAIRUL AKMAL
10621003714**

**PROGRAM S-1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Salah satu tugas tersebut adalah menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, yaitu mengenai perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Sehubungan dengan itu sangat menarik sekali untuk mengkaji tentang tugas dan fungsi panitera memberikan akta cerai kepada para pihak pencari keadilan sebagai bukti bahwa antara suami isteri telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas panitera dalam hal pemberian akta cerai di Pengadilan Agama bangkinang serta apa faktor-faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah *field reseach* dengan cara survey ke lapangan dengan menggunakan wawancara kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang, panitera Pengadilan Agama Bangkinang, serta kepada pihak-pihak berperkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) akan tetapi akta cerainya belum diberikan atau terlambat diberikan kepada pihak-pihak tersebut.

Pelaksanaan pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang dilaksanakan dengan cara menunggu para pihak menjemput ke Pengadilan Agama Bangkinang. Setelah selesai pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dijelaskan kepada para pihak-pihak tentang hak dan kewajibannya. Seandainya pihak-pihak menerima putusan dalam arti tidak mengajukan upaya banding, disarankan untuk menjemput akta cerainya ke Pengadilan Agama Bangkinang setiap hari kerja. Hal ini dilakukan karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pemungutan biaya untuk mengantarkan akta cerai kepada pihak, sedangkan jika dikirim melalui pos panitera beserta pimpinan pengadilan agama belum dapat menjamin bahwa akta cerai tersebut akan sampai ke tangan yang bersangkutan.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem pemberian akta cerai yang di Pengadilan Agama Bangkinang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	12
B. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang	20
C. Kewenangan Pengadilan Agama	30
D. Keadaan Perkara Cerai Di Bangkinang Tahun 2009	32
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang	34

BAB III KEPANITERAAN PERADILAN

A. Pengertian Panitera	36
B. Kedudukan Panitera	38
C. Tugas Panitera	40
D. Fungsi Panitera	50
E. Syarat-syarat Panitera	51

F. Proses Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai di Pengadilan Agama -----	51
G. Format Akta Cerai -----	58
H. Susunan Organisasi Kepaniteraan -----	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang-----	62
B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang-----	64
C. Tinjauan Undang-undang Tentang Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang -----	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	76
B. Saran -----	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 (2) menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha negara dan Peradilan Militer.¹ merupakan salah satu menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.²

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 maka kewenangan pengadilan dilingkungan diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut antara lain meliputi Ekonomi Syaria'ah.

¹ UUD 1945 RI pasal 24 (2)

² Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan dilingkungan di perluas hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu diantaranya adalah tentang gugatan perceraian pasal (40 ayat 1) dan permohonan talak (pasal 39).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap fungsi kedudukan dan kewenangan dari peradilan semu menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam tata hukum di Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain.

Bila kita berbicara tentang hukum dan dunia peradilan tentu lebih dahulu kita akan membicarakan apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok dari peradilan. Untuk menjawab ungkapan tersebut diatas dapat kita kutip pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan Mahkamah Agung dan badan peradilan berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tugas pokok dari Peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.³

Menerima berarti menerima setiap perkara yang diajukan oleh orang-orang yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain, dan memeriksa berarti mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan dimuka sidang terhadap pihak-pihak yang berperkara, guna membuktikan kebenaran gugatan/permohonan.

Sedangkan mengadili berarti mengeluarkan suatu vonis melalui petugas setelah diadakan proses pemeriksaan penyelidikan seperlunya oleh Hakim. Adapun menyelesaikan adalah proses akhir dari pada setiap jenis perkara atau kasus yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan khususnya Pengadilan Agama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah melalui produk hukum yang dikeluarkan oleh majelis Hakim meliputi :

1. Putusan
2. Penetapan
3. Akta Cerai
4. Akta Waris dan Hibah

Berdasarkan ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Panitera Pengadilan (Tugas, Fungsi, Dan Tanggung Jawab) Cet-Ke 4* (Proyek Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. 2004), h. 17

Tinggi Agama. Tugas pokok kepaniteraan tidak dipisahkan dari tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan.⁴

Dalam peradilan di Negara Indonesia panitera yang kedudukannya adalah sebagai unsur pembantu pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Disamping hakim, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan atas jalannya proses perkara sejak diterima, diperiksa, diadili sampai diselesaikan panitera yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik.

Tugas panitera menurut perundang-undangan meliputi tugas bidang administrasi, bidang persidangan dan bidang eksekusi.⁵ Sehubungan dengan itu menarik sekali untuk mengkaji tentang fungsi petugas dan kewajiban panitera memberikan Akta Cerai sebagai bukti kepada pada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pemberian Akta Cerai itu kepada pihak merupakan suatu kewajiban tanpa memperhatikan halangan. Dan apabila tidak dilaksanakan oleh Panitera tentu akan merugikan pihak-pihak yang berperkara yang sangat membutuhkan Akta Cerai sebagai bukti bahwa antara pihak suami dan pihak istri terjadi perceraian dimuka sidang Pengadilan Agama. Untuk itu lebih jelasnya penulis akan menuliskan pasal 84 ayat 4 tersebut yang

⁴ *Ibid*,

⁵ *Ibid*, h. 19

berbunyi :”Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan panitera di Pengadilan Agama Bangkinang pelaksanaan pemberian Akta Cerai kepada pihak-pihak yang berperkara setelah berkekuatan hukum tetap justru merupakan suatu kesulitan yang dihadapi di lapangan. Dari 484 perkara yang diputus telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2009, yang terdiri dari sebanyak 324 lembar Akta Cerai dari putusan permohonan ceria gugat dan 160 lembar Akta Cerai dari putusan cerai talak. Akta Cerai yang sudah diberikan kepada pihak-pihak, dari 484 lembar yang sudah diberikan kepada para pihak bervariasi, hanya sebanyak 30% kira-kira 145 Akta Cerai yang diberikan tepat waktu sesuai menurut pasal 84 ayat 4 Undang-Undang No 7 Tahun 1989.⁶

Berdasarkan data tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam masalah ini, apa dan kenapa adanya kendala dalam pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang sehingga tidak bisa melaksanakan amanat dalam pasal 84 ayat 4 Undang-Undang No 7 Tahun 1989.

Penulis ingin mengetahui lebih jauh kiranya bagaimana pelaksanaan pemberian Akta Cerai kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang dan apa kendala sehingga tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS PANITERA DALAM**

⁶ Nasri Alamsah. (Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, 25 April 2010

**PEMBERIAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
(Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya ruang lingkup penelitian ini, maka perlu diadakan batasan masalah yang akan diteliti, adalah pelaksanaan tugas panitera dalam pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2009.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas panitera dalam pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang ?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang tentang pelaksanaan tugas panitera dalam pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas panitera di Pengadilan Agama Bangkinang.
 - b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyampaian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pelaksanaan pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal akta cerai, khususnya tentang tugas panitera dalam penyampaian akta cerai baik yang bersifat teoritis maupun prakteknya di Pengadilan Agama Bangkinang.
- b. Sebagai informasi terutama bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum Islam pada Fakultas syari'ah di UIN Suska Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkinang, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 99 Bangkinang.

2. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini tergolong kedalam penelitian *field reseach*, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian ini tidak hanya menguraikan data melainkan juga melakukan analisis secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada berhubungan dengan tugas penitera dalam pemberian Akta Cerai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tugas panitera tentang pelaksanaan pemberian Akta Cerai.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Panitera, pimpinan Pengadilan Agama, dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian Akta Cerai oleh panitera di Pengadilan Agama Bangkinang.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah panitera dan ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang berjumlah 5 orang. Adapun dalam penelitian ini penulis menjadikan semua jumlah populasi menjadi informan (Riset Populasi).

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder dikumpulkan:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari informan yaitu panitera Pengadilan Agama Bangkinang dan ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang berjumlah 5 orang.

b. Data Sekunder

Data skunder data yang dari orang-orang yang dapat memberikan informasi yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk lisan, brosur, dokumentasi, dan literatur-literatur yang terkait dan dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan dan perpustakaan, dengan demikian untuk memperoleh data lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknik:

a. Wawancara

Adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada Pengadilan Agama Bangkinang.

7. Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh dilapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah data berdasarkan jenis data, selanjutnya data berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan terperinci kemudian data ini dianalisis dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

Yaitu penulis menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Deskriptif

Yaitu metode penulisan dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya, dan dapat disusun menurut yang diperlukan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil dari penelitian ini, maka dibuatlah satu sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan Bab Sejarah , Kewenangan , Keadaan perkara cerai di Pengadilan Agama Bangkinang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

Bab III : Kepaniteraan Peradilan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian panitera, kedudukan panitera, tugas-tugas panitera, fungsi panitera, syarat-syarat panitera, dan susunan organisasi kepaniteraan.

Bab IV : Hasil penelitian, dan pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang proses penerbitan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang, faktor penghambat dalam hal pemberian akta ceria di Pengadilan Agama Bangkinang dan tinjauan undang-undang tentang pelaksanaan tugas panitera dalam pemberian Akta Ceria.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pada Bab Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran, Atau Menjawab Perumusan Masalah Yang Telah Diuraikan Pada Bab Sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Berbicara tentang sejarah di Indonesia, siapapun harus mengakuinya secara jujur bahwa keberadaannya di negara Indonesia cukup memakan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan Agama Islam itu sendiri. Hal ini karena memang Islam merupakan agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Maksudnya selain Agama Islam mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Dengan demikian berarti Islam dan hukum Islam selalui beriringan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.¹ Oleh karena itu pertumbuhan Islam selalu sekaligus diikuti pertumbuhan Islamnya itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan di atas bahwa di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ketujuh masehi. Pada mulanya Agama Islam di Indonesia dianut oleh orang-orang secara sendiri-sendiri, artinya belum terbentuk sebagai masyarakat yang teratur. Akhirnya berkembang sebagaimana masyarakat Islam sekarang ini. Dalam keadaan Islam masih dipeluk secara sendiri-sendiri, maka pada saat itu masih berbentuk tahkim, yaitu suatu penyerahan kepada seseorang. Muhakkam guna menjatuhkan suatu hukum atas persengketaan.²

¹ Daud Ali, *Undang- Undang* , Jakarta : Panji Masyarakat. No. 634 tanggal 1-10 Januari, h. 71

² Taufiq Hamami, Artikel Utama “Ikhtisar Sejarah di Indonesia “Mimbar Hukum, No 59 Tahun XIV 2003, Penerbit Al Hikmah dan Dibirper Islam, h. 17

Pengangkatan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa. Setelah sedikit masyarakatnya berkembang, artinya telah teratur namun belum mempunyai pemerintahan, maka pembentukan dan pengangkatan suatu peradilan dan jabatan hakimnya dilakukan secara musyawarah dan pemilihan serta bai'at *Ahlul Halli Wal Aqdi*.³

Perkembangan selanjutnya Islam dominan mewarnai seluruh kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia, hal ini terlihat dimasa kerajaan demak dan akhirnya mengakar di beberapa daerah seperti di Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya.⁴ Pada masa ini peradilan bukan lagi berbentuk tahkim, akan tetapi sedah berbentuk peradilan (qadha) sehingga dikenak istilah rapat agama dan mahkamah Syari'ah.

Ketika kolonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, yakni wadah dagang yang sasarannya untuk menjajah Nusantara, tidak dapat menyepelekan eksistensi hukum Islam yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Islam Indonesia. Meskipun akhirnya VOC semakin kokoh mencengkramkan dan bahkan penjajah nusantara, tidak mampu menekan dan membendung pelaksanaan hukum Islam yang menjadi keyakinan hidup. Upaya untuk menghapus hukum Islam yang dilakukan hanya pada bidang hukum pidana.⁵

Pengadilan Agama sebenarnya sudah ada sejak masuknya Agama Islam ke nusantara, dan memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna setelah

³ *Ibid*, h. 18

⁴ Idris Ramulyo, M, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hill Co, h. 8

⁵ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983, h. 44-45

berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Aceh, Demak, Banten dan lain-lainnya. Dengan masuknya VOC hukum-hukum yang diberlakukan dikumpulkan oleh kompeni. Pengumpulan hukum pidana dilakukan di Semarang yang menghasilkan sebuah kitab bernama Mukhamar. Selain itu disusun pula hukum perkawinan dan kewarisan yang dikenal dengan *compendium friyer*, makanya Terhaar mengatakan bahwa adalah semata-mata berasal dari raja-raja dan Bupati yang digunakan untuk memasukkan hukum Islam dalam masyarakat.⁶

Pada mulanya VOC, Inggris maupun Belanda tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa antara penduduk pribumi terutama dalam bidang Peradilan Agama. Akan tetapi setelah kekuasaan mereka semakin kuat yaitu sejak tahun 1820 mereka secara bertahap mencampurinya. Hal ini terlihat dalam *Regenten Instructie* pasal 13 yang berbunyi "bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan dikalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama Islam.

Dalam usaha untuk menertibkan Pengadilan Agama maka dikeluarkan sebuah putusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam stbld 1882 Nomor 153 yang isinya :

1. Disamping tiap-tiap landraad diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah hukum yang sama.
2. Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada landraad sebagai ketua, dan sekurang-kurangnya 3 orang serta sebanyak-banyaknya 8 orang ulama Islam sebagai anggota.

⁶ Taufiq Hamami, *Op, Cit*, h. 20

3. Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya 3 orang anggota, termasuk ketuanya sendiri hadir, dalam keadaan pertimbangan suara maka ketua menentukan.
4. Keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan secara singkat dan ditandatangani oleh anggota yang hadir, begitu pula dicatat biaya perkara yang dibebankan kepada orang yang berperkara.
5. Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan-salinan surat putusan yang ditandatangani oleh ketua.
6. Keputusan Pengadilan Agama harus memuat dalam surat register yang setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada kepala daerah setempat untuk memperoleh visum darinya.
7. Keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3 dan 4 tidak dapat dinyatakan berlaku.

Pada tahun 1937, diadakan pula perubahan terhadap stbl 1882 nomor 152 dan 153, yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 19 Februari 1937 yang kemudian dimuat dalam stbl 1937 nomor 116. isinya antara lain bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memutuskan perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam, atau yang termasuk dalam perkara nikah, talak dan rujuk, dan perceraian sedangkan hal-hal yang menyangkut bidang hadhonah

(penguasaan dan pemeliharaan anak), waris, wakaf, harta benda dan lain sebagainya dicabut dan diserahkan kepada landraad.⁷

Perubahan tersebut merupakan pembatasan wewenang Pengadilan Agama, sehingga kasus wakaf, hadhanah, waris dan hal-hal yang menyangkut harta benda akibat nikah, talak dan rujuk diserahkan kepada landraad. Dengan adanya perubahan tersebut, timbul reaksi dari masyarakat yang mengecam keras pembatasan kekuasaan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu para pegawai Pengadilan Agama membuat suatu perkumpulan yang disebut PPDP (Perhimpunan Penghulu dan Pegawai). Dalam kongres pertama di Surakarta tanggal 16 mei 1937 salah satu kepala pemerintahan kolonial agar stbl nomor 116 dicabut, dengan alasan:

1. Hukum adat sifatnya tidak tetap, sedangkan hukum Islam tetap berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
2. Orang Islam yang menerima petusan adat dalam kasus waris sama dengan mengingkari agamanya.
3. Pencabutan hukum waris bagi Pengadilan Agama tidak memberi perbaikan meskipun diberi ganti rugi sebesar 75% dari penghasilan Pengadilan Agama tahun 1934-1935.
4. Kedudukan penghulu dalam pengadilan atau diluarnya dianggap sebagai kepala agama sehingga stbl 1937 tidak terlepas dari masalah agama.
5. Pembagian waris menurut Islam telah berlaku beratus tahun bagi penganut Islam.⁸

⁷ Zaini Ahmad Noeh, *Op, Cit*, h. 40

Meskipun stbl 1937 nomor 116 mendapat protes dan sanggahan dari umat Islam, namun tidak mendapat perhatian pemerintahan. Oleh karenanya stbl 1937 tersebut tetap saja berlaku.

Dengan masuknya Jepang (1942-1945) keberadaan Pengadilan Agama dan kekuasaannya tetap memberlakukan stbl sebelumnya berdasarkan peraturan peradilan pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*osanu sairei*) tanggal 7 maret 1945.⁹ selama kekuasaan Jepang di Indonesia (1942-1945) keadaan sama halnya disaat pemerintahan kolonial Belanda, dalam arti tidak ada perubahan kecuali penyesuaian nama menjadi *sooryo hoin* untuk Peradilan Agama.

Setelah Indonesia merdeka keberadaan Pengadilan Agama dan kekuasaannya mendapat perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut disebabkan dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 januari 1946, oleh sebab itu hal-hal yang menyangkut dengan Pengadilan Agama serta kekuasaannya berada di bawah pengawasan Departemen Agama. Untuk merombak sisa-sisa kolonial Belanda, pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 / 1948 tentang susunan dan kekuasaan kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memasukkan secara istimewa ke dalam susunan Peradilan Umum. Ternyata Undang-undang ini menghendaki dihapuskannya sebagai suatu lembaga peradilan yang terdiri sendiri. Dan selanjutnya untuk menangani perkara-perkara yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama, ditampung oleh

⁸ Depag RI, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Proyek Depag, 1985, h. 23

⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Op, Cit*, h. 29

Pengadilan Negeri secara istimewa dengan bentuk penanganan perkaranya diketuai oleh seorang hakim yang beragama Islam dan didampingi oleh dua orang hakim ahli Agama Islam.¹⁰

Keadaan yang demikian itu berlaku di daerah-daerah yang secara *de facto* dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Bagi daerah yang tercakup dalam negara Sumatra Timur dibentuk Majelis Agama Islam dengan ketetapan wali negara Sumatra Timur tanggal 1 Agustus 1950 Nomor 350, dalam majelis ini terdapat satu bagian yang bertugas dalam bidang yang kemudian dengan ketetapan Menteri Agama Nomor 2/1953 bagian tersebut dinyatakan sebagai Islam.¹¹

Pada tahun 1951, melalui penetapan Mentri Agama No. 1 Tahun 1951 diadakan penataan terhadap pegawai Pengadilan Agama, berupa pengangkatan para pegawainya menjadi Pegawai Negara. Sehingga pada mulanya mereka tidak mendapat gaji, maka setelah adanya penetapan tersebut mereka digaji secara tetap dari negara.

Dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura maka diajukan sebuah rancangan Undang-undang peraturan pemerintah tentang pembentukan /Mahkamah Syari'ah untuk daerah aceh yang akhirnya keluarlah Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1957. peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan penyelesaian bagi daerah lain secara integral. Akhirnya peraturan pemerintah tersebut dicabut dan diganti oleh Peraturan Pemerintah

¹⁰ *Ibid*, h. 31

¹¹ *Ibid*, h. 31

No 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di daerah luar Jawa dan Madura serta sebahagian Kalimantan.

Pada awal pemerintahan orde baru, tindakan pertama kali dilakukan dalam rangka penataan pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara murni, sesuai dengan TAP MPR No. XIX/MPR / 1966 jo no. XXXIX / MPR / 1968 pemerintah mengadakan peninjauan terhadap Undang-undang no. 6 Tahun 1969 yang menghendaki adanya suatu undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang baru. Sebagai realisasinya tanggal 17 Desember 1970 disahkan undang-undang tentang hal tersebut yang kita kenal dengan undang-undang no 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut keberadaan semakin kokoh sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Bahkan kedudukannya disetarapkan dengan Peradilan-peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha negara dan Peradilan Militer. Kekokohan ini lebih menonjol lagi setelah disahkan dan diundangkannya Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 tentang perkawinan, dan diundangkannya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya yang secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975.

Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, maka kasasi atas perkara yang diputuskan Pengadilan Agama mulai masuk ke Mahkamah Agung, sementara hukum acara yang seharusnya dimilikinya tentang hal itu belum ada. Untuk menanggulangi kenyataan ini pada tanggal 26 November 1977

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturannya No 1 tahun 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi untuk sementara waktu sampai dimilikinya undang-undang tentang susunan kekuasaan dan acara secara integral.

Sejalan dengan kenyataan-kenyataan di atas, maka untuk dapat memantapkan serta memegang teguh tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam jajaran kekuasaan kehakiman di negara Indonesia telah mengangkat seorang ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan . Dengan demikian berarti tugas pembinaan teknis yustisial terhadap yang selama ini dilakukan oleh Departemen Agama telah menjadi wewenang penuh Mahkamah Agung sesuai kehendak Undang-undang no 14 tahun 1970 tersebut.

Pada akhirnya sebagai puncak dari kekokohan dan kemapanan badan sebagai Pengadilan Negara adalah dengan disahkan serta diundangkannya Undang-undang No 7 Tahun 1989 pada tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan kekuasaan dan acara . Menurut bustanul arifin, lahirnya undang-undang tersebut menjadikan benar-benar sebagai aparat kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.¹²

Sepanjang pemerintahan orde baru ini keberadaan lembaga sebagai satu pelaksana kekuasaan kehakiman (juga lembaga peradilan lainnya) pembicaraan dan pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu lembaga yudikatif dan eksekutif.¹³ Disatu sisi pembinaan tekhnis dilakukan oleh Mahkamah Agung dan disisi lain

¹² Bustanul arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 84

¹³ *Ibid*, h. 87

organisasi, administrasi dan financial badan pembinaanya dilakukan oleh Depertemen Agama.

B. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99) dasar berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang.

Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei – 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang berkedudukan di Bangkinang.

Jika kita melihat pada sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang ini erat hubungannya dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1956. sedangkan pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru dan barulah pada tanggal 5 Juni 1967 pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Kolonel R. Soebrantas

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang tepatnya tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang dirangkap

oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dan dua orang Karyawan waktu pada waktu itu masing-masing :

- a. Abbas Hasan
- b. Abd. Rahman Rasyid.

Walaupun personil Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana Gedung belum serta sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut dengan fungsinya sebagai sebuah badan Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia.

Sejak itu pulalah (tanggal 5 Juni 1967), semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (sebutan sebelum keluarnya undang-Undang no 32 Tentang Otonomi Daerah) sudah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun waktu itu sarana perkantoran masih belum lengkap.

Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak itu Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Selama dalam sejarah perjalanan Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang sejak awal hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Adapun pimpinan Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang sejak pertama berdiri hingga sekarang dapat dilihat pada table berikut:

TABEL. I. 1
DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

NO	NAMA	Tahun memimpin	Keterangan
1	2	3	4
1.	KH. Abdul Malik	1958-1969	Pensiun
2.	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974	Pensiun
3.	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978	Pensiun
4.	Drs. Idris	1994-2001	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
5.	Drs. Taslim	2001-2003	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
6.	Drs.H.Syahril,SH., MH	2003-2006	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
7.	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009	Hakim Tinggi PTA Mataram
8.	Drs. H. Sudirman, MH	2009-sekarang	Masih Aktif

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Dari sembilan pergantian pimpinan sebagaimana pada table di atas , baru pada tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh wakil yang pada waktu itu jabatan ketua disebut dengan PYMT (Pejabat yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang di kendalikan oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Adapun nama-nama pejabat yang pernah menduduki jabatan wakil ketua di Pengadilan Agama Kelas I. B. Bangklingang Adalah :

TABEL. I. 2
DAFTAR NAMA WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I. B BANGKINANG

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	2	3	4

1	Drs. Syahril.SH.,MH	1994 s/d 2001	PYMT/HT. PTA.Pekanbaru
2	Drs. Masnur Yusuf.SH.,MH	2001 s/d 2007	Ketua PA. Tembilahan
3	Drs.H. Sudirman,MH	2007 s/d 2008	Ketua PA Kelas I.B Bangkinang
4	Drs. H. Fuizalman.SH.,MH	2009 s/d sekarang	Mutasi dari Hakim Senior PA. Jakarta Selatan

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Disamping dua jabatan pimpinan tersebut diatas untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang dibantu oleh panitera yang sejak berdirinya hingga hingga sekarang telah terjadi pergantian panitera sebanyak 5 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.3 berikut ini :

TABEL. I. 3
DAFTAR PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS I. B BANGKINANG
SEJAK BERDIRI HINGGA SEKARANG

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	2	3	4
1	ABD. RAHMAN RASYID	1967 s/d 1981	Pensiun/Alm
2	RASJID,BA	1981 s/d 2000	Pensiun
3	Drs. MARDANIS.SH.,MH	2000 s/d 2001	Hakim PA Kelas I.B Bangkinang
4	ZULHERMIS,SH	2001 s/d 2005	Pensiun
5	NASRI ALAMSA,SH	2005 s/d sekarang	Masih aktif

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Seiring perkembangan zaman dari tahun ketahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilyah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang medapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara maka pimpinan Pengadilan Agama bangkinang terus

3. Secara Geografis (Alam : Laut, Selat, Samudra, Sungai) dan Secara Administratif (kewilayahaan) Kabupaten Kampar berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : dengan Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat
- b. Sebelah Utara : dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- c. Sebelah timur : dengan Kab. Pelalawan dan Kab. Siak
- d. Sebelah Selatan : dengan Kuantan Singingi

1) Pembagian Wilayah Hukum

Kabupaten Kampar terdiri dari 20 Kecamatan, yang meliputi:

- I. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 4 Kelurahan/Desa
 - 1. Kelurahan Bangkinang
 - 2. Desa Kumantan
 - 3. Kelurahan Langgini
 - 4. Desa Ridan Permai
- II. Kecamatan Kampar terdiri dari 13 Kelurahan dan 12 Desa
 - 1. Kelurahan Air Tiris
 - 2. Desa Tanjung Berulak
 - 3. Desa Desa Tanjung Rambutan
 - 4. Simpang Kubu
 - 5. Desa Naumbai
 - 6. Desa Limau Manis
 - 7. Desa Pulau Jambu
 - 8. Desa Batu Belah
 - 9. Desa Ranah
 - 10. Desa Kabun Pulau Pandak
 - 11. Desa Penyasawan .
 - 12. Desa Rumbio
 - 13. Desa Padang Mutung
- III. Kecamatan. Tambang terdiri dari 16 Desa
 - 1. Desa Tambang
 - 2. Desa Pulau Permai
 - 3. Desa Kuapan
 - 4. Desa Aur Sati
 - 5. Desa Gobah
 - 6. Desa Padang Luas
 - 7. Desa Terantang
 - 8. Desa Rimbo Panjang
 - 9. Desa Kualu
 - 10. Desa Kemang Indah
 - 11. Desa Kulau Nenas
 - 12. Desa Sungai Pinang
 - 13. Desa Teluk Kenidai
 - 14. Desa Parit Baru
 - 15. Desa Tarai Bangun
 - 16. Desa Balam Jaya
- IV. Kecamatan. Bangkinang Barat terdiri dari 6 Desa :
 - 1. Desa Kuok
 - 2. Desa Merangin
 - 3. Desa Empat Balai
 - 4. Desa Pulau Jambu
 - 5. Desa Silam
 - 6. Desa Bukit Melintang
- V. Kecamatan. Bangkinang Seberang terdiri dari 10 Desa :
 - 1. Desa Pulau Lawas
 - 6. Desa Jernih

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 2. Desa Muara Uwai | 7. Desa Suka Mulya |
| 3. Kelurahan Pasir Sialang | 8. Desa Laboi Jaya |
| 4. Kelurahan Pulau | 9. Desa Bukit Payung |
| 5. Desa Binuang | 10. Desa Bukit Sembilan |

- VI. Kecamatan. Salo terdiri dari 6 Desa :
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Desa Salo | 4. Desa Ganting Damai |
| 2. Desa Salo Timur | 5. Desa Sipungguk |
| 3. Desa Ganting | 6. Desa Siabu |
- VII. Kecamatan. Kampar Utara terdiri dari 7 Desa :
- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Desa Muara Jalai | 5. Desa Sungai Jalau |
| 2. Desa Sungai Tonang | 6. Desa Sendayan |
| 3. Desa Sawah | 7. Desa Kayu Aro |
| 4. Desa Kampug Panjang | |
- VIII. Kecamatan. Rumbio Jaya terdiri dari 7 Desa :
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Desa Pulau Payung | 5. Desa Bukit Teratai |
| 2. Desa Teratak | 6. Desa Batang Batindih |
| 3. Desa Simpang Petai | 7. Desa Tambusai |
| 4. Desa Alam Panjang | |
- IX. Kecamatan. Kampar Timur terdiri dari 9 desa :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Desa Pulau Rambai | 6. Desa Deli Makmur |
| 2. Desa Kampar | 7. Desa Sawah Baru |
| 3. Desa Koto Perambahan | 8. Desa Tanjung Alai |
| 4. Desa Pulau Birandang | 9. Desa Tanjung Bunga |
| 5. Desa Sungai Putih | |
- X. Kecamatan. Siak Hulu terdiri dari 13 desa :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Desa Pangkalan Baru | 8. Desa Buluh Nipis |
| 2. Desa Baru | 9. Desa Tanjung Balam |
| 3. Desa Buluh Cina | 10. Desa Kapau Jaya |
| 4. Desa Tanah Merah | 11. Desa Pangkalan Sarik |
| 5. Desa Teratak Buluh | 12. Desa Kubang Jaya |
| 6. Desa Lubuk Siam | 13. Desa Rimbo Makmur |
| 7. Desa Pandau Jaya | |
- XI. Kecamatan. XIII Koto Kampar terdiri dari 20 desa :
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Desa Tabing | 11. Desa Tanjung Alai |
| 2. Desa Gunung Malelo | 12. Desa Ranah Sungkai |
| 3. Desa Tanjung | 13. Desa Lubuk Agung |
| 4. Desa Gunung Bungsu | 14. Desa Koto Mesjid |

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 5. Desa Koto Tuo | 15. Desa Bandar Picak |
| 6. Desa Balung | 16. Desa Pongkai Istiqomah |
| 7. Desa Muara Takus | 17. Desa Binamang |
| 8. Desa Pongkai | 18. Desa Kemang |
| 9. Desa Siberuang | 19. Kelurahan Batu Bersurat |
| 10. Desa Pulau Godang | 20. Desa Koto Tuo Barat |

XII. Kecamatan. Kampar Kiri terdiri dari 18 desa :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Kelurahan Lipat Kain | 10. Desa Mekar Jaya |
| 2. Desa Lipat Kain Selatan | 11. Desa Sungkai Sarik |
| 3. Desa Kuntu | 12. Desa Utama Jaya |
| 4. Desa Padang Sawah | 13. Desa Sungai Geringging |
| 5. Desa Domo | 14. Desa Sungai Raja |
| 6. Desa IV Koto Sitingkai | 15. Desa Sungai Rambat |
| 7. Desa Kuntu Darussalam | 16. Desa Sungai Paku |
| 8. Desa Teluk Paman | 17. Desa Tanjung Harapan |
| 9. Desa Lipat Kain Utara | 18. Desa Muara Selaya |

XIII. Kecamatan. Kampar Kiri Hilir terdiri dari 9 Kelurahan/Desa :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Desa Sungai Pagar | 6. Desa Sungai Petai |
| 2. Desa Mentulik | 7. Desa Gading Permai |
| 3. Desa Sunagi Simpang Dua | 8. Desa Desa Bangun Sari |
| 4. Desa Sungai Bunga | 9. Desa Singawek |
| 5. Desa Rantau Kasih | |

XIV. Kecamatan. Kampar Kiri Hulu terdiri dari 21 Kelurahan/Desa :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Desa Gema | 12. Desa Tanjung Beringin |
| 2. Desa Tanjung Belit | 13. Desa Gajah Betaluk |
| 3. Desa Tanjung Belit Selatan | 14. Desa Pangkalan Serai |
| 4. Desa Kota Lama | 15. Desa Danau Sentul |
| 5. Desa Batu Sanggan | 16. Desa Deras Tajak |
| 6. Desa Aur Kuning | 17. Desa Terusan |
| 7. Desa Ludai | 18. Desa Subayang Jaya |
| 8. Desa Tanjung Kadorang | 19. Desa Sungai Santi |
| 9. Desa Batu Sasak | 20. Desa Tanjung Permai |
| 10. Desa Pangkalan Kapas | 21. Desa Dua Sepakat |
| 11. Desa Kebun Tinggi | |

XV. Kecamatan. Tapung terdiri dari 24 Kelurahan/Desa :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Desa Petapahan | 13. Desa Tanjung Sawit |
| 2. Desa Pantai Cermin | 14. Desa Pagaruyung |
| 3. Desa Petapahan Jaya | 15. Desa Sibuaak |
| 4. Desa Mukti Sari | 16. Desa Pelamboyan |

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 5. Desa Sungai Putih | 17. Desa Kinantan |
| 6. Desa Indra Sakti | 18. Desa Indra Puri |
| 7. Desa Gading Sari | 19. Desa Sei Lembu Makmur |
| 8. Desa Sumber Makmur | 20. Desa Muara Mahat Baru |
| 9. Desa Pancuran Gading | 21. Desa Karya Indah |
| 10. Desa Sari Galuh | 22. Desa Kijang Rejo |
| 11. Desa Tri Manunggal | 23. Desa Sungai Agung |
| 12. Desa Air Terbit | 24. Desa Benca Kelubi |

XVI. Kecamatan. Tapung Hilir terdiri dari 16 Kelurahan/Desa :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Desa Koto Garo | 9. Desa Tanah Tinggi |
| 2. Desa Sekijang | 10. Desa Kijang Jaya |
| 3. Desa Beringin Lestari | 11. Desa Tapung Lestari |
| 4. Desa Kota Bangun | 12. Desa Tapung Makmur |
| 5. Desa Cinta Damai | 13. Desa Tandan Sari |
| 6. Desa Suka Maju | 14. Desa Gerbang Sari |
| 7. Desa Kota Baru | 15. Desa Kijang Makmur |
| 8. Desa Tebing Lestari | 16. Desa Koto Aman |

XVII. Kecamatan. Tapung Hulu terdiri dari 12 Kelurahan/Desa :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Desa Senama Nenek | 7. Desa Tanah Datar |
| 2. Desa Kasikan | 8. Desa Rimbo Makmur |
| 3. Desa Bukit Kemuning | 9. Desa Rimbo Beringin |
| 4. Desa danau Lancang | 10. Desa Suka Ramai |
| 5. Desa Muara Intan | 11. Desa Sumber Sari |
| 6. Desa Intan Jaya | 12. Desa Kasau Makmur |

XVIII. Kecamatan. Kampar Kiri Tengah terdiri dari 10 Kelurahan/Desa :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Desa Simalinyang | 6. Desa Karya Bakti |
| 2. Desa Penghidupan | 7. Desa Kota Damai |
| 3. Desa Mayang Pongkai | 8. Desa Hutama Karya |
| 4. Desa Lubuk Sakai | 9. Desa Bina Baru |
| 5. Desa Hidup Baru | 10. Desa Bukit Sakai |

XIX. Kecamatan. Gunung Sahilan terdiri dari 5 Kelurahan/Desa :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Desa Gunung Sahilan | 4. Desa Gunung Sari |
| 2. Desa Kebun Durian | 5. Desa Suka Makmur |
| 3. Desa Subarak | |

XX. Kecamatan. Perhentian Raja terdiri dari 4 Kelurahan/Desa :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Desa Pantai Raja | 3. Desa Hangtuah |
| 2. Desa Kampung Pinang | 4. Desa Sialang Kubang |

4. Visi dan misi.

1) Visi

Menegakkan Supermasi Hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri dan efektif serta memenuhi rasa keadilan publik, profesional dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang prima dan berkualitas, untuk terciptanya lembaga peradilan yang bersih dan sehat.

2) Misi.

- a) Mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui putusan yang berkualitas dengan tetap menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b) Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan melalui perubahan dan pelatihan yang kontinuitas.
- c) Ikut serta mewujudkan fungsi hukum sebagai social control, dispute settlement, social engineering, dan sosial Maintenance.
- d) Mewujudkan citra Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang sebagai pengadilan yang berwibawa, bersih, akuntabel dan mandiri.

C. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata “wewenang” sering disebut dengan “kekuasaan” atau juga disebut dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”.

Berbicara tentang kewenangan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “kekuasaan *relative* dan kekuasaan *absolut*”.

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Pengadilan Agama Bangkinang.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan “Pengadilan Agama ada di kota madya atau di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Kekuasaan relative sangat penting adanya, karena menyangkut dengan kepengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan selainnya menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Termasuk juga kedalam pengertian ini bahwa Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili tingkat pertama, tidak boleh langsung diajarkan ke Pengadilan Tinggi Agama atau mempunyai kensekwensi harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Ini berarti terlarang bagi Pengadilan Agama untuk menangani kasus yang buka menjadi kewenangannya. Jika pihak pengadilan menerima berarti gugatan dapat mengajukan keberatan atau eksepsi absolut.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi :

Pasal 49 ayat :

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :
 - 1) Perkawinan
 - 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - 3) Wakaf dan sadaqah.
- b. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang diatur dalam huruf (b) adalah :
 - 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
 - 2) Penentu mengenai harta peninggalan.
 - 3) Penentu mengenai bagian masing-masing ahli waris dan,
 - 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

D. Keadaan Perkara Cerai Di Bangkinang Tahun 2009

Volume penerimaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang tahun 2009 dan perbandingan dengan tahun 2008. dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persentasi penerimaan perkara:

TABEL. 4
DAFTAR PERKARA YANG DITERIMA BERDASARKAN PERBANDINGAN
PORSENTASE PENERIMAAN TAHUN 2008 DAN 2009

No	Jenis perkara	Perkara Th 2008	Perkara Th 2009	Persentasi (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Cerai Talak	113 Perkara	159 Perkara	28,9%	Naik
2	Cerai gugat	287 Perkara	328 Perkara	12,5%	Naik
3	Izin poligami	1 Perkara	2 Perkara	50%	Naik
4	Harta bersama	4 Perkara	5 Perkara	20%	Naik
5	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	1 Perkara	-	100%	Turun
6	Isbat Nikah	1 Perkara	11 Perkara	90,9%	Naik
7	Dispensasi kawin	1 Perkara	3 Perkara	66,7%	Naik
8	Wali Adhol	4 Perkara	1 Perkara	75%	Turun
9	Kewarisan	2 Perkara	5 Perkara	60%	Naik
10	Pembatalan Perkawinan	-	1 Perkara	100%	Naik
11	Pengesahan Anak	-	1 Perkara	100%	Naik
12	Perwalian	-	1 Perkara	100%	Naik
13	Hadhona	-	1 Perkara	100%	Naik
14	Lain-lain	1 Perkara	1 Perkara	0%	Sama
Jumlah:		415 Perkara	519 Perkara	20,04%	Naik

Sumber: Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangkinang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan perkara tahun 2009 sebanyak 519 perkara,dan jika dilihat dari penerimaan perkara tahun 2008 yaitu sebanyak 415 perkara, maka pada tahun 2009 telah terjadi peningkatan perkara sebanyak 104 perkara atau mengalami kenaikan jumlah perkara sebesar 20,04 %.

2. Penyelesaian Perkara yang Diterima Dalam Tahun 2009

Adapun rincian perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2009 terdiri dari penyelesaian sisa perkara tahun 2008 sebanyak 72 perkara ditambah perkara dengan penyelesaian perkara yang masuk tahun 2009 sebanyak 519 perkara, maka penyelesaian perkara tahun 2009 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

TABEL. 5
PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2009 DARI JUMLAH
SISA PERKARA 2008 DAN PERKARA YANG DITERIMA
PADA TAHUN 2009

No	Jenis perkara	Sisa perkara tahun 2008	Perkara masuk 2009	Jlh. Perkara (sisa 2008 + prkr msk th 2009)	Perkara diputus (diselesaikan)	Persentasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Cerai Talak	20 Perkara	159 Perkara	179 Perkara	160 Perkara	89,4%
2	Cerai gugat	46 Perkara	328 Perkara	358 Perkara	340 Perkara	94,9%
3	Izin poligami	-	2 Perkara	2 Perkara	1 Perkara	50%
4	Harta bersama	3 Perkara	5 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	100%
5	Isbat Nikah	-	11 Perkara	11 Perkara	10 Perkara	90,9%
6	Dispensasi kawin	-	3 Perkara	3 Perkara	2 Perkara	66,7%
7	Wali Adhol	1 Perkara	1 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	100%
8	Kewarisan	2 Perkara	5 Perkara	7 Perkara	6 Perkara	85,7%
9	Pembatalan Perkawinan	-	1 Perkara	1 Perkara	-	0%
10	Pengesahan Anak	-	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	100%
11	Perwalian	-	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	100%
12	Hadhona	-	1 Perkara	1 Perkara	-	0%
13	Lain-lain	-	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	100%
Jumlah:		72 Perkara	519 Perkara	591 Perkara	516 Perkara	87,3%

Sumber: Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangkinang

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 519 perkara yang di terima tahun 2009 ditambah sisa perkara tahun 2008 sebanyak 72 perkara adalah 591 perkara keseluruhan sedangkan perkara yang dapat di selesaikan/diputus sebanyak 516 perkara atau 87,3 %.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang di lihat dari tugas dan jabatan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Sudirman.MH

- 2. Wakil Ketua** : Drs. H. Fuizalman, SH, MH
- 3. Hakim:** : 1. Dra. Nurzauti,SH.,MH
 2. Drs.M. Taufik,MH
 3. H.Bakhtiar Latif,S.Ag.,MH
 4. Drs.M.Zen,SH.,MH
 5. Dra. Hj. Sofinar Mukhtar,MH
 6. Drs.Mardanis,SH, MH
 7. Drs.Nursolihin
 8. Mardi Candra,S.Ag.,M.Ag
- 4. Panitera Sekretaris** : Nasri Alamsa, SH
- 5. Wakil Panitera** : Sudirman, SH
1. Panitera Muda Gugatan : -
2. Panitera Muda Permohonan: Zulfazni, SH
3. Panitera Muda Hukum : Izar.A.Md.,SH
- 6. Wakil Sekretaris** : Ramlis,SH
1. Kasubag Kepegawaian : Burhanuddin,SH, MH
2. Kasubag Keuangan : Siti Sahlaini Army.S.Ag .,SH
3. Kasubag Umum : Drs. Sinar
- 7. Kelompok Panitera Pengganti:** 1. Siti Rusani.y.BA
 2. Warnis
 3. Netti Adha.SH
 4. Zuriati.S.Ag.
- 8. Kelompok Jurusita** : 1. Misnuri
 2. Zainal Abidin
 3. Mulyadi
- 9. Kelompok Jurusita Pengganti** 1.Nasir
 2.Rahmi.BA
 3.Nurbaiti
 4.Ronni
- 10. Kelompok CPNS** 1.Edy Efrizal, SH
 2. Tomi Andespa Siahaan

BAB III

KEPANITERAAN PERADILAN

A. Pengertian Panitera

Aparat peradilan sebagai pilar kekuasaan kehakiman terdiri dari hakim, panitera dan jurusita. Berikut ini penulis akan menguraikan pengertian hakim, panitera dan jurusita.

1. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dimana proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri masing-masing berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 (1) dan (2)).

2. Panitera

Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya.¹

Panitera adalah pejabat kepaniteraan dan sebagai pejabat kepaniteraan maka panitera memimpin kepaniteraan (pasal 27 ayat 1 undang-undang no. 2 tahun 1986). Untuk mempelajari tugasnya maka panitera pengadilan dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, panitera pengganti, dan jurusita dalam bidang tugasnya masing-masing (Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang No. 2 Tahun

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 824

1986). Faktor dedikasi dan pengalaman kerja seorang panitera sangat menentukan lancar/tidaknya fungsi kepaniteraan pengadilan yang dipimpinnya.

Panitera diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri kehakiman, dan sebelum memangku jabatannya panitera diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan, (pasal 37 dan 38 undang-undang no. 2 tahun 1986).

3. Panitera Pengganti

Panitera pengganti membantu panitera pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan panitera pengganti menjadi sangat vital dan sangat diperlukan untuk membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan (pasal 59 Undang-undang No. 2 tahun 1986). Terlebih lagi panitera pengadilan tidak mungkin harus selalu atau sesering mungkin mengikuti sidang pengadilan, mengingat seorang panitera pengadilan sebagai pimpinan kepaniteraan sudah cukup banyak tugasnya.

Dengan demikian kebutuhan akan tenaga panitera pengganti sangat dirasakan di pengadilan, apalagi jumlah perkara perdata/pidana semakin meningkat jumlahnya seiring dengan makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin banyaknya para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam menjalankan tugasnya, kecermatan seorang panitera pengganti dalam mengikuti jalannya persidangan serta keterlibatan dan kerapian dalam membuat berita acara sidang dan pengetikan konsep putusan hakim dan membuat putusan baik perkara perdata/pidana untuk waktu yang tidak terlalu lama.

4. Jurusita

Jurusita sebagaimana pejabat kepaniteraan yang lain diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman, setelah diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan sebelum menjalankan tugasnya, menurut Agama atau kepercayaannya.

Keberadaan jurusita untuk melaksanakan tugas luar/lapangan seperti dalam hal menyampaikan relas penggilan hari-hari sidang, melakukan penyitaan adalah sangat diperlukan karena panitera pengadilan tidak mungkin keluar kantor sesering mungkin untuk melaksanakan tugas luar/lapangan tersebut.

B. Kedudukan Panitera

Dalam peradilan di negara Indonesia panitera yang kedudukannya adalah sebagai unsur pembantu pimpinan memiliki peran yang sangat penting, disamping hakim, panitera menjadi unsur yang sangat menentukan atas jalannya proses perkara sejak diterima, diperiksa, diadili sampai diselesaikan panitera yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik.

Jika mengacu pada Teori *Trias Politica Montesque*, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan Negara yang berdiri terpisah dari kekuasaan yang lain. Sebagaimana kita ketahui trias politica membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu, *eksekutif*, *legislative* dan *yudikatif* (kekuasaan kehakiman). Hal ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh dari *intervensi* pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Pemahaman kekuasaan kehakiman sebagaimana kekuasaan yang merdeka ditegaskan dalam penjelasan pasal 24 undang-undang dasar 45 yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.

Pada prinsipnya manajemen peradilaan di Indonesia dipimpin oleh seorang panitera yang merangkap sebagai sekretaris. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tatakerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi peradilaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dari tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai dari proses penerimaan pendaftaran perkara, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi membutuhkan kerja-kerja administrasi yang tidak lain menjadi tugas kepaniteraan.

C. Tugas Panitera

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas bahwa tugas panitera tidak dipisahkan dari tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Wildan mengungkapkan bahwa tugas panitera menurut ketentuan perundang-undangan meliputi tugas bidang administrasi, bidang persidangan dan bidang eksekusi.²

Sebagai pejabat kepaniteraan untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan tugas-tugas panitera secara umum, sebagai berikut :

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
3. dengan dibantu wakil panitera dan panitera muda mennyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara-perkara perdata maupun keuangan perkara.
4. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan.
5. Membuat akta dan salinan putusan serta memberikannya kepada para pihak.
6. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
7. Melaksanakan eksekusi putusan dalam perkara perkara (yang telah berkekuatan hokum tetap) yang diperintahkan oleh ketua pengadilan.

² Wildan sayuti, *Op, Cit*, h. 19

Tugas kepaniteraan tersebut secara lebih luas pada prinsipnya dapat dipilih menjadi tiga bidang tugas kepaniteraan yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Panitera Bidang Administrasi (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Dalam bidang administrasi, panitera akan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda, oleh karena itu undang-undang mensyaratkan pula bagi pejabat panitera, wakil dan panitera muda suatu syarat secara berjenjang untuk dapat menjabat jabatan yang lebih tinggi. Tugas-tugas kepaniteraan di dalam bidang administrasi adalah sebagai berikut :³

- a. Menyelesaikan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
- b. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lainnya.
- c. Membuat semua daftar perkara yang diterima dikepaniteraan
- d. Membuat salinan putusan atau penetapan pengadilan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara.
- f. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaaporkannya kepada ketua pengadilan.
- g. Membuat akta-akta.

³ Wildan Sayuthi musthofa. *Op, Cit*, h. 18

Dalam tugas-tugas administrasi perkara, bagi panitera yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Tata cara penerimaan perkara.

Berkaitan dengan tugas kepaniteraan dibidang administrasi Pengadilan Agama ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam hal teknis penerimaan perkara (meja pertama). Dalam penerimaan perkara hendaknya meja pertama hanya bertugas menerima saja dan agar dihindari dialog atau pembicaraan yang berlebihan yang menyangkut materi perkara. Kalaupun ada penjelasan, maka penjelasan itu hendaklah sekedar kepada yang bersangkutan tentang tata cara pengajuan perkara, penaksiran biaya perkara.

b. Legalisasi surat

Salah satu tugas kepaniteraan adalah memberikan legalisasi atas permintaan para pihak. Agar terdapat keseragaman redaksional legalisasi surat-surat bukti, harus mengacu pada Surat Mahkamah Agung No. MA/Kumdil/225/VII/1994 tentang legalisasi surat. Surat-surat yang telah dilegalisir oleh panitera tidak menutup kewenangan hakim untuk melihat asli surat yang bersangkutan.

Lain halnya yang harus diperhatikan dalam legalisasi surat ini adalah bahwa Pengadilan Agama tidak dibenarkan mengambil alih tugas dan wewenang kantor pos (*nezeglen*) karena di setiap ibu kota kabupaten telah ada kantor pos. maka setiap surat yang dijadikan bukti dalam persidangan harus *nezeglen* pos dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama.

c. Biaya legalisasi di pengadilan

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No. KMA/1036/X/1994 tentang bidang teknis pengadilan tentang akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan maka pengadilan diberi wewenang untuk melakukan legalisasi ataupun pengesahan waarmedking.

d. Surat kuasa khusus

Dalam tugas penerimaan perkara panitera seringkali menerima kuasa khusus. Sesuai dengan namanya surat kuasa tersebut harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu. Apabila dalam surat kuasa khusus itu telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah dan berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan tetapi jika dalam surat kuasa khusus tersebut tidak disebutkan sampai upaya hukum kasasi maka jika pihak melakukan kasasi, diperlukan surat kuasa khusus yang baru.

Dalam perkara cerai (khusus cerai talak) jika pihak pemohon memberikan kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak, maka ucapan ikrar talak tersebut harus dibunyikan dalam surat kuasa khusus tersebut.

e. Biaya administrasi

Berkaitan dengan biaya administrasi perkara sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaannya. Mahkamah agung menetapkan besarnya pungutan biaya

administrasi sesuai dengan SEMA no. 2 tahun 2000 tentang biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) bagi pengadilan tingkat pertama. Untuk tertibnya administrasi keuangan perkara pungutan biaya administrasi dilakukan bersama-sama dengan panjar perkara dan dicatat pada buku jurnal masing-masing sesuai dengan jenisnya.

Khusus terhadap perkara prodeo (secara Cuma-Cuma) dibebaskan dari biaya administrasi, tetapi tetap dilakukan pencatatan dengan keterangan "nihil". Dalam hal pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim diluar ruang sidang pengadilan sama sifatnya dengan persidangan yang dilakukan dikantor pengadilan. Oleh karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang bersifat honor/uang makan bagi majelis hakim/penitua pengganti kecuali hanya untuk pengadaan biaya transportasi dari kantor pengadilan ketempat persidangan pulang pergi.⁴

f. Penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara yang merupakan bagian tugas kepaniteraan menurut ketentuan yang ada harus sudah diputuskan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasan sebab terlambatnya penyelesaian perkara kepada ketua pengadilan tingkat banding.

⁴ *Ibid*, h. 27

g. Biaya perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung menentukan besarnya biaya permohonan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Ini dilakukan untuk menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung.

h. Permohonan kasasi perdata yang tidak menemui persyaratan formal

Undang-undang yang berlaku selama ini pada dasarnya memuat ketentuan bahwa terhadap putusan semua jenis perkara dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Implikasi dari peraturan ini menyebabkan semakin menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi tidak meneruskan ke mahkamah agung terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan undang-undang keterangan tidak meneruskan permohonan kasasi ini dibuat dalam surat keterangan kepaniteraan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh ketua pengadilan tingkat pertama. Tugas panitera kemudian mengirimkan laporan ke Mahkamah Agung.

i. Petunjuk penerimaan tamu

Realitas objektif hari ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sering mengajukan keluhan terhadap dunia peradilan. Keluhan tersebut tidak hanya menyangkut kecepatan dan ketepatan pelayanan, melainkan juga menyangkut martabat, integritas dan kepercayaan umum terhadap dunia peradilan. Meskipun keluhan tersebut tidak sepenuhnya benar namun tidak bisa dinafikan begitu saja.

Munculnya keluhan masyarakat tersebut salah satunya disebabkan oleh perilaku sementara warga peradilan yang dengan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar melakukan berbagai tindakan tidak terpuji. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan, maka peradilan dan segenap aparat peradilan menjunjung tinggi etika *"hubungan dengan pihak yang berperkara atau yang berkepentingan dengan suatu perkara"*.⁵ Untuk menjauhkan diri dari segala kemungkinan hubungan yang dapat menimbulkan purbasangka dan penyalahgunaan wewenang maka hakim, pejabat kepaniteraan dan semua aparat di lingkungan pengadilan dilarang menerima tamu dari pihak atau yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang atau sudah diperiksa dan diputus kecuali menyangkut dengan proses administrasi dari perkara tersebut apabila karena pertimbangan tertentu harus diterima atau tidak dapat diletakkan maka pertemuan itu harus dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, tidak boleh hanya salah satu pihak.

j. Pola bindalmin Pengadilan Agama

Berkenaan dengan pelaksanaan pola bindalmin Pengadilan Agama sebagaimana termaktub dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/1/1991 dengan surat Mahkamah Agung RI no 43 /TUADA-AG/III/UM/XI/1992 ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh panitera Pengadilan Agama yaitu :

⁵ *Ibid*, h. 34

- 1) Pencantuman nomor perkara yang terdiri dari 4 lajur, merupakan bagian dari segala penetapan, surat-surat panggilan, surat pemberitahuan, berita acara persidangan. Berita acara sita, dan putusan yang semuanya merupakan akta autentik. Dengan demikian penomoran perkara tersebut tidak dapat diubah bentuk apaun.
- 2) Setelah pengadilan mengucapkan putusannya kepada para pihak berperkara, ketua majelis/hakim akan memberikan penjelasan tentang isi putusan yang dijatuhkannya serta hak-hak bagi pihak terhadap putusan tersebut seperti banding-kasasi dan lain sebagainya. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam relas panggilan akan bunyi putusan juga dicantumkan hal tersebut.
- 3) Mengingat bunyi pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang penyampaian isi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap hukum tetap kepada para pihak dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada pihak-pihak tersebut. Hal ini haru diperhatikan oleh panitera Pengadilan Agama mengingat fungsi akta cerai itu adalah sebagai bukti cerai antara suami dan istri setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama.⁶

2. Tugas Panitera Bidang Persidangan

Dalam bidang untuk mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, panitera yang berhalangan akan digantikan oleh seorang panitera pengganti. Sebagai pejabat

⁶ *Ibid*, h. 21-41

yang mengikuti dan mencatat jalannya persidangan panitera pengganti tidak berada dibawah komando panitera, akan tetapi melaksanakan perintah hakim/majelis hakim.

Adapun tugas-tugas panitera dibidang persidangan sebagai berikut :

- a. Membantu hakim dengan menghadiri dari mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Menyusun berita acara persidangan.
- c. Memberitahukan putusan verstek dan putusan diluar hadir.
- d. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan buku dalam persidangan.
- e. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali..

Tugas-tugas panitera tersebut di atas diatur dalam pasal 97 undang-undang nomor 7 tahun 1989.

3. Tugas Panitera Bidang Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk

melaksanakannya. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.⁷

Menurut Sudikno Mertokusuko, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut.⁸ Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara terpaksa (*execution force*).

Sebagai pejabat yang melaksanakan putusan/eksekusi perkara perdata, penitera hanya mempunyai hubungan dengan ketua pengadilan untuk melaksanakan perintah yang diwujudkan dalam bentuk penetapan ketua pengadilan, dan dalam hal halangan panitera akan digantikan oleh jurusita. Dalam hal ini panitera bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Tugas panitera bidang eksekusi diatur dalam Pasal 98 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 "panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan".

Melihat kepada peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah panitera. Apabila panitera berhalangan maka dapat dilakukan oleh jurusita, jadi tidak dilaksanakan bersama-sama, melainkan panitera sendiri atau jurusita sendiri dengan dibantu oleh dua orang saksi.

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Jakarta, Pranada Media, , 2005, h. 213

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit liberty, Yogyakarta, 1988. h. 201

D. Fungsi Panitera

Pada prinsipnya manajemen Peradilan di Indonesia dipimpin oleh seorang panitera yang merangkap sekretaris. Oleh karena itu seorang panitera harus mampu menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial mengatur semua kegiatan dan keikutsertaan karyawan dalam kegiatan organisasi. Sedangkan fungsi operasional menentukan jumlah dan mutu tenaga kerja sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi panitera pada dasarnya mencakup lima hal :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana.
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op, Cit*, h. 41

E. Syarat-syarat Panitera

Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Agama seorang calon harus memuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor & Tahun 1989 sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa.
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik tahun 1945
5. Berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
6. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Agama, dan
7. Sehat jasmani dan rohani

Dalam pasal 36 undang-undang nomor 7 tahun 1989, panitera, wakil panitera. Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

F. Proses Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai di Pengadilan Agama

Penyerahan Akta Cerai merupakan tahap akhir dari proses Peradilan disamping pelaksanaan putusan hakim melalui eksekusi, karena proses penyelesaian perkara di Pengadilan dan pengendalian administrasi perkara Pengadilan Agama berdasarkan

keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SE/1/1991 tentang Pola Bindalmin.

Sebagaimana berlaku pada Peradilan Umum, administrasi Peradilan Agama juga terdiri dari pola-pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara, pola registrasi perkara, pola keuangan perkara, pola pelaporan perkara dan pola tentang kearsipan perkara.¹⁰

Selanjutnya secara singkat penulis menguraikan prosedur penyelenggaraan administrasi perkara hingga di serahkannya Akta Cerai berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas sebagai berikut :

1. Meja Pertama Bertugas :

- a. Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), eksekusi, penjelasan dan penafsiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
- b. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
- c. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan satu lembar kepada calon penggugat/pemohon.
- d. Menaksir biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 121 HIR/145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Dalam perkara cerai talak dalam menaksir biaya perkara diperhitungkan juga biaya pemanggilan sidang ikrar talak.

¹⁰ *Ibid*, h. 251

- e. Selain penerimaan perkara seperti tersebut di atas, meja pertama juga berkewajiban memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

2. Kas

Pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama. Selaku pemegang kas ia akan menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.

3. Meja Kedua Bertugas :

- a. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak tergugat/terlawan.
- b. Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan tersebut.
- c. Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dengan dilengkapi semua instrumen untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
- d. Mendaftar/mencatat putusan pengadilan dalam kolom buku register yang tersedia.

Dalam hal ini tugas meja kedua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh panitera, antara lain sebagai berikut :

- 1) Panitera harus sudah menyerahkan surat gugatan yang diterima selambat-lambatnya pada hari kedua kepada ketua Pengadilan Agama. Kemudian kembali berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan penunjukan majelis hakim (PMH) yang harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak gugatan/permohonan didaftarkan.

2) Penitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya dari ketua / wakil ketua majelis yang bersangkutan.

3) Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk diperbantukan kepada majelis hakim yang ditunjuk.

4. Meja Ketiga Bertugas :

- a. Atas permintaan para pihak yang berperkara menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan.
- b. Menyerahkan salinan penetapan pengadilan kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan atas salinan pininjauan kembali (PK).
- d. Menetapkan urutan/giliran jurusita pengganti.
- e. Menyerahkan akta cerai kepada para pihak.
- f. Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penyerahan salinan putusan, penetapan dan akta cerai kepada pihak-pihak merupakan tugas meja ketiga sebagai perpanjangan tangan dari panitera.

Penyerahan akta cerai di Pengadilan Agama setelah perkara telah berkekuatan hukum tetap, artinya setelah diputuskan oleh hakim putusan dan tidak ada para pihak yang berperkara untuk banding, di bawah ini penulis akan menguraikan teknik menjatuhkan putusan pada perkara sampai di beritahukan isi putusan tersebut:

1. Putusan

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op, Cit*, h. 88-91

- a. Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat, apabila mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat, maka suara terbanyak menjadi putusan Majelis. Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan dan hakim yang berbeda pendapat tersebut tetap menandatangani putusan.
- b. Putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg serta surat edaran mahkamah agung No. 3 tahun 2000 dan No. 4 tahun 2001.
- c. Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah siap dan segera diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

Berdasarkan poin (c) di atas, maka dapat diketahui bahwa, setelah perkara diputuskan oleh hakim, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

- d. Pada putusan dibuat catatan kaki putusan berkenaan:
 - 1) Segala perkembangan hukum atas putusan hakim;
 - 2) Adanya perintah pemberitahuan isi putusan, contoh : Ketua Majelis Hakim PAmemerintahkan kepada JS/JSP PA tsb, untuk memberitahukan putusan ini kepada tergugat dan memerintahkan pula agar kepada tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila PBT telah dilaksanakan, panitera membuat catatan kaki di bawahnya. Contoh : dicatat di sini : putusan telah diberitahukan kepada tergugat tanggal

- e. Adanya permohonan banding atau kasasi, contoh, dicatat di sini : tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal(ditandatangani oleh panitera)
- f. Telah BHT-nya putusan. Contoh : dicatat di sini : putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal(ditandatangani panitera).
Catata kaki BHT ini menjadi dasar : terjadinya cerai (CG). Penetapan sidang Ikrar talak (CT) dan eksekusi.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar telah selesinya perkara cerai talak, cerai gugat, dan eksekusi adalah setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) putusan.

2. Pemberitahuan Isi Putusan

- a. Jika penggugat/pemohon atau tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan, maka panitera/jurusita pengganti harus memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
- b. Jika tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah RI, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah daerah tingkat II setempat atau yang ditunjuk oleh Pemda untuk mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

¹² Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, 2009, h. 37-38

Agama dalam waktu 14 hari, baik dalam perkara bidang perkawinan maupun yang lainnya.¹³

¹³ *Ibid*, h. 38-39

3. Minutasi Berkas Perkara

- a. Ketua majelis hakim bertanggung jawab atas ketetapan batas waktu minutasi perkara.
- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, berkas perkara harus sudah diminutasi. (sesuai ketentuan pasal 64A ayat (2) UU No. 50/2009.
- c. Berkas perkara yang diminutasi, diberi sampul, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama.
- d. Berkas disusun secara berangsur dan kronologis.

4. Penyampaian Salinan Putusan

- a. Petugas Meja III mengirim pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama kepada pegawai pencatat nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) dimana perkawinan dicatat, dan di tempatpara pihak bedomisili. (Pasal 72, 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).¹⁴

Berdasarkan uraian pada poin 4 (a), dapat diketahui bahwa yang menyampaikan putusan dan akta cerai bagi perkara cerai talak dan cerai gugat adalah tugas meja III sebagai perpanjang tangan dari Panitera. Penyampaian akta cerai telah diatur dalam pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, yaitu :

¹⁴ *Ibid*, h. 39

“Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”.

G. Format Akta Cerai

Akta cerai yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Bangkinang adalah sesuai dengan format akta cerai yang telah dikeluarkan dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung R. I Nomor : 1 Tahun 1997. Adapun isi dari format akta cerai tersebut akan penulis uraikan secara singkat sebagai berikut.

Pada kepala akta cerai di tuliskan Nomor, yang dimaksud dengan Nomor tersebut adalah nomor perkara, setelah itu garing AC (Akta Cerai) maksudnya adalah nomor akta cerai yang keluar dari Pengadilan Agama yang keberapa, setelah itu garing PA (Pengadilan Agama) maksudnya adalah Pengadilan Agama mana yang menerbitkan, sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Agama Bangkinang.

Panitera Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah, untuk selain Aceh yang dipakai adalah Pengadilan Agama, dan mencoret Mahkamah Syari'ah, maksud dari ini adalah Pengadilan Agama mana. Setelah itu menerangkan, bahwa pada hari ini, yang dimaksud dengan pada hari ini adalah pada hari ingkrahnya putusan, atau setelah perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah itu menuliskan tanggal masehi dan bertepatan dengan tanggal hijriahnya. Setelah itu berdasarkan, yang dimaksud dengan berdasarkan adalah putusan hakim Pengadilan Agama Bangkinang, jika perkara cerai gugat, jika cerai talak maka ditulis berdasarkan penetapan Pengadilan Agama

Bangkinang. Setelah itu Nomor, yang dimaksud dengan Nomor adalah nomor perkara, setelah itu tanggal maksudnya adalah tanggal masuknya perkara. Setelah itu yang telah mempunyai hukum tetap, telah terjadi pereraian antara : jika cerai gugat, maka nama istrilah yang terlebih dahulu ditulis, jika yang terjadi cerai talak maka nama suaminya yang terlebih dahulu di tulis, yang di tuliskan adalah nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal yang jelas, kecamatan dan kabupaten/kota.

Setelah itu perceraian yang ke. Maksudnya adalah perceraian yang terjadi pada pihak berperkara yang keberapa. Setelah itu termohon / penggugat (bekas istri) dalam keadaan qabla / ba'da dukhul*) dukhul, dan termohon (bekas istri) dalam keadaan suci / hadi/ hamil, maka tulislah dalam keadaan apa bekas istri, dan coret yang tidak perlu. Setelah itu kutipan akta nikah dari KUA kecamatan kabupaten / kota. . . . tanggal. . . .nomor. . . .

Demikianlah dibuat akta crai ini, ditandatangani oleh kami, maksudnya adalah yang menanda tangani panitera Pengadilan Agama bersangkutan. Dan di bawah sebelah kanan ditandatangani oleh panitera.

Agar lebih jelasnya, penulis lampirkan format akta cerai yang sesuai dengan format dari Mahkamah Agung. (terlampir)

H. Susunan Organisasi Kepaniteraan

Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan di Indonesia dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun tugas bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, sifatnya

adalah teknis operasional dan berkaitan dengan bidang substantif. Sedangkan tugas bantuan adalah tugas yang berkaitan dengan kegiatan –kegiatan yang bersifat menunjang atau mendukung kepada pelaksanaan tugas pokok, sifatnya adalah teknis administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).¹⁵

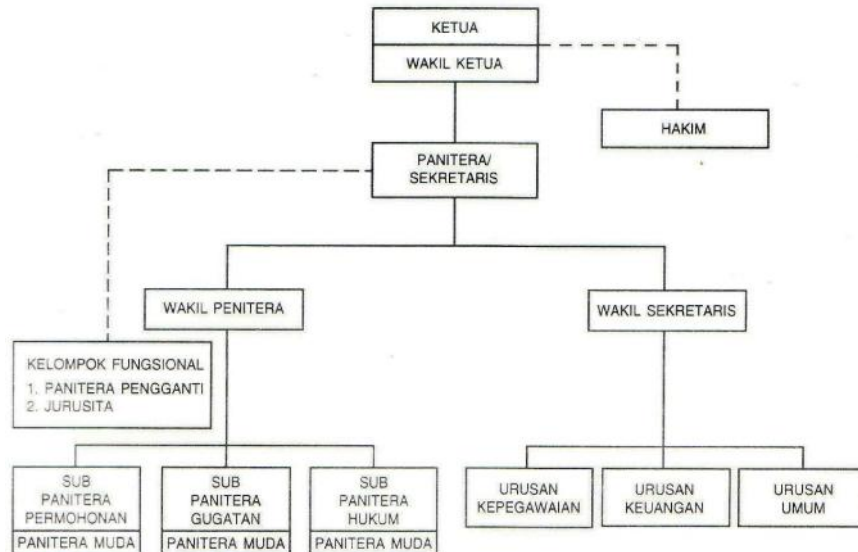
Pada prinsipnya organisasi Kepaniteraan Pengadilan di Indonesia dipimpin oleh seorang panitera yang merangkap sekretaris. Dengan kata lain penitera adalah manager dan dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepaniteraan (tugas pokok). Panitera dibantu seorang wakil panitera, sedangkan dalam bidang kesekretariatan (tugas Bantuan) dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Bidang sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi yaitu suatu administrasi yang berhubungan dengan bidang-bidang umum, keuangan dan personalia. Adapun bidang kepaniteraan bertugas melaksanakan administrasi perkara, selaku pelaksana mengenai kegiatan utama yang bersifat teknis operasional menyangkut menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk kepaniteraan , wilayah kerjanya dibagi menjadi 3 sub/urusan yaitu : 1). Sub/urusan kepaniteraan permohonan, 2). Sub/urusan kepaniteraan gugatan dan 3). Sub/urusan kepaniteraan hukum. Masing-masing sub/urusan kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera muda.

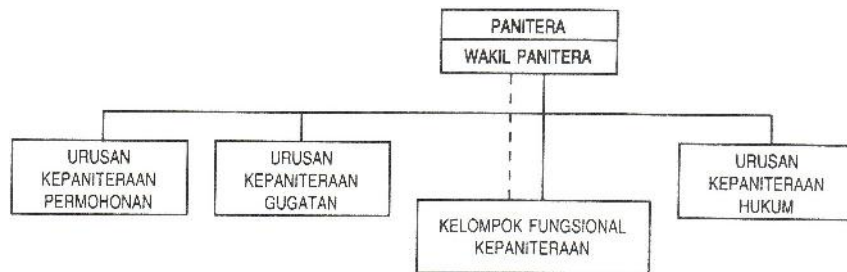
Oleh karena itu struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya adalah sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*, h. 45

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA



Pengadilan Agama bangkinang adalah Pengadilan Agama kelas IB, struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Agama kelas IB adalah sebagai berikut :



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang

Proses penerbitan akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah penulis cantumkan dalam BAB III, agar lebih jelasnya praktek proses pemberian dan penyerahan akta cerai di Pengadilan Agama penulis mewawancarai beberapa orang pegawai di Pengadilan Agama Bangkinang yang terkait dalam proses penerbitan akta cerai dan penyerahan akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang.

Dra. Nurzauti,SH.,MH, sebagai salah seorang hakim di pengadilan Agama Bangkinang, yang penulis wawancara pada hari senen tanggal 20 September 2010 mengatakan bahwa :¹

Proses pembuatan akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut, namun tugas hakim dalam proses pembuatan akta cerai di Pengadilan Agama hanya sampai diputuskannya perkara, setelah itu berkas-berkas perkara diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

Zuriati, S. Ag, sebagai salah satu panitera pengganti di Pengadilan Agama Banginang, yang penulis wawancara pada tanggal 21 September 2010 menerangkan tentang proses pembuatan akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang bahwa :

¹ Nurzauti, (Hakim Pengadilan Agama Bangkinang), *wawancara*, tanggal 20 September 2010

Proses pembuatan akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut. Sebelum panitera menyampaikan akta cerai kepada pihak-pihak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh panitera, pada perkara cerai gugat dan pada perkara cerai talak.

Perkara cerai gugat, setelah di putusan oleh hakim putusan, maka berkas-berkas perkara dikembalikan kepada panitera, berkas-berkas tersebut berada pada hakim selama 14 hari. Waktu 14 hari adalah waktu bagi pihak-pihak berperkara yang tidak puas terhadap putusan hakim dan ingin melakukan banding, jika dalam waktu 14 hari tersebut para pihak-pihak tidak melakukan banding, maka esok harinya, hari ke 15 putusan hakim berkekuatan tetap atau disebut dengan ingkra, maka mulai pada hari ke 15 itu juga panitera segera membuat akta cerai dan dalam waktu 7 hari selambat-lambatnya telah diserahkan pada pihak-pihak.

Perkara cerai talak. Setelah putusan telah diputuskan oleh hakim, maka berkas-berkas perkara dikembalikan kepada panitera, berkas-berkas tersebut berada pada hakim selama 14 hari. Waktu 14 hari adalah waktu bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim dan ingin melakukan banding, jika dalam waktu 14 hari tersebut para pihak-pihak tidak melakukan banding atau disebut dengan ingkra, maka pada saat itulah putusan hakim berkekuatan tetap, setelah putusan berkekuatan tetap, maka panitera memberitahukan minimal 3 hari sebelum sidang kepada pihak-pihak yang berperkara melakukan ikrar talak, setelah itu panitera segera membuat akta cerai dan dalam waktu 7 hari selambat-lambatnya telah diserahkan pada pihak-pihak.

Adapun cara penyampaian akta cerai kepada pihak-pihak yang telah diatur di Pengadilan Agama Bangkinang adalah sesuai dengan yang tertera dalam pasal 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 :”Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Namun pada prakteknya dalam penyampaian akta cerai kepada para pihak tidak sesuai dengan perundang-undangan, yaitu dalam 7 hari harus diantarkan kepada para pihak-pihak, hanya sebagian kecil penyampaian akta cerai kepada para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor-faktor.²

Setelah penulis dapatkan penjelasan dari hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bangkinang, menjelaskan bahwa proses pembuatan akta cerai di Pengadilan Agama sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, namun dalam penyampaian akta cerai kepada para pihak yang bersangkutan tidak sesuai dengan peranturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor, di bawah ini penulis akan menguraikan faktor-faktor penghambat dalam pemberian atau penyampaian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang.

B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang

² Zuriati, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 21 September 2010

Sejauh ini di Pengadilan Agama Bangkinang belum terdapat penyimpangan yang fatal dalam pelaksanaan dan proses pembuatan akta cerai. Akan tetapi dalam prakteknya Pengadilan Agama Bangkinang belum sepenuhnya mengeluarkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Dalam banyak kasus Akta Cerai itu dibuat dan diberikan kepada para pihak atau kuasanya setelah para pihak merasa perlu dan datang ke Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengambil Akta Cerai tersebut.

H. Sudirman, ketua Pengadilan Agama Bangkinang mengatakan bahwa pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang dilakukan dengan cara menunggu para pihak pencari keadilan datang menjemput akta cerai tersebut setelah diberitahukan kepada para pihak hak dan kewajibannya masing-masing. Akan tetapi mereka tidak mengambil akta cerai tersebut pada hari dan tanggal yang kami tentukan sehingga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Nasri Alamsyah, panitera / sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang dengan cara menunggu kedatangan para pihak untuk mengambilnya, sebab tidak ada ketentuan

³ H. Sudirman, (Ketua Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, 30 Agustus 2010

untuk mengatarkan akta cerai kepada para pihak, sedangkan akta cerai tersebut telah dipersiapkan sebelum kedatangan para pihak.⁴

Begitu juga hasil wawancara penulis dengan wakil panitera yaitu bapak Sudirman, SH mengatakan bahwa, pelaksanaan pemberian akta cerai kepada pihak-pihak yang berperkara adalah dengan cara pihak-pihak yang memerlukan akta cerai tersebut mengambil atau menjemput ke Pengadilan Agama Bangkinang, oleh sebab itu masih ada akta cerai yang belum diambil oleh pihak yang bersangkutan, dikarenakan mereka belum atau tidak akan memerlukan akta cerai lagi.⁵

Pengadilan Agama Bangkinang telah berusaha pada setiap akhir persidangan setelah putusan dibacakan ketua majelis selalu memberitahukan kepada para pihak akan hak dan kewajibannya dan juga tatacara pengambilan akta cerai.

Hasil wawancara penulis dengan pihak bersangkutan yang menerima akta cerai pada tahun 2009 pada tanggal 01 September 2010 yaitu ibu Sari Bulan mengatakan bahwa akta cerai diambil sendiri ke Pengadilan Agama Bangkinang, akta cerai ini diambil karena ibu Sari Bulan ingin menikah kembali, dan waktu mengambil akta cerai ke pengadilan agama bangkinang sudah lewat waktu yang ditentukan dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989.⁶

Begitu juga hasil wawancara penulis dengan bapak Amir Hamzah penulis wawancara pada tanggal 01 September 2010, bapak amir hamzah mengatakan bahwa

⁴ Nasri Alamsyah, SH, (Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2010

⁵ Sudirman, SH, (Hasil Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 20 September 2010

⁶ Sari Bulan, (Pihak Terkait Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 01 September 2010

beliau mengambil akta cerai langsung ke Pengadilan Agama Bangkinang, karena digunakan untuk menikah kembali dengan perempuan lain, adapun waktu bapak Amir mengambil akta cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah terlambat, tidak sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989.⁷

Selanjutnya pada tanggal 02 September 2010 penulis mewawancarai bapak Adi Saputra tentang pemberian akta cerai, bahwasanya akta cerai langsung diambil oleh bapak Adi ke pengadilan, dan telah lewat dengan waktu yang telah ditentukan dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989.⁸

Hal ini bukan sengaja dilalaikan dengan menunggu kedatangan para pihak oleh panitera, walaupun akta cerai tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh panitera, ternyata masih ada para pihak yang belum mengambilnya sehingga akta cerai tersebut menumpuk dan disimpan ke dalam arsip perkara dalam waktu yang tidak ditentukan atau sampai para pihak datang menjemputnya.

Penelitian yang penulis lakukan terhadap data pengeluaran akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2009 sebanyak 484 lembar hanya 145 lembar atau 30% dari jumlah kesuruhan yang diberikan kepada para pihak tepat waktu, sedangkan yang lainnya ada yang diberikan dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, hampir satu tahun, bahkan masih ada yang belum diberikan sama sekali.

⁷ Amir Hamzah, (Pihak Terkait Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 01 September 2010

⁸ Adi Saputra, (Pihak Terkait Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 02 September 2010

Jumlah 484 lembar akta cerai yang diberikan kepada para pihak bervariasi sebagai berikut :

No	Waktu Penyerahan Akta Cerai	Jumlah
1	Tepat Waktu	145 Lembar
2	Dua Minggu	74 Lembar
3	Satu Bulan	95 Lembar
4	Satu Tahun	67 Lembar
5	Belum diberikan	103 Lembar
	Jumlah	484 Lembar

Sumber: Laporan Dokumen Tahunan 2010

Berdasarkan uraian di atas maka pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang bervariasi yaitu tepat waktu sebanyak 145 lembar, yang mengambilnya setelah dua minggu keterlambatan daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 74 lembar, yang mengambilnya setelah satu bulan terlambat sebanyak 95 lembar, yang mengambilnya setelah terlambat lebih kurang satu tahun sebanyak 67 lembar, dan ada yang belum mengambil sama sekali sebanyak 103 lembar di sebabkan karena :

1. Alamatnya tidak diketahui
2. Setelah terjadi perceraian mereka pergi merantau dan tidak kembali lagi
3. Telah melangsungkan perkawinan sebelum terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga mereka tidak membutuhkan akta cerai lagi.

4. Bagi perempuan yang umurnya sudah lanjut, merasa tidak membutuhkan akta cerai karena tidak akan mungkin kawin lagi.⁹

Berdasarkan uraian di tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadinya hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang di rasakan oleh panitera. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Panitera Pengadilan Agama Bangkinang dan jurusita Pengadilan Agama Bangkinang.

Bapak H. Sudirman, sebagai ketua Pengadilan Agama Bangkinang yang penulis wawancarai pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2010 berpendapat bahwa:¹⁰

“Pemberian Akta Cerai kepada para pihak merupakan kewajiban dari panitera seperti yang tersebut dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang No 3 tahun 2006 pasal 84 (4), akan tetapi di Pengadilan Agama Bangkinang tidak dilaksanakan seperti tuntutan yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut, karena tidak tersedianya dana untuk itu. Dengan mengingat azas peradiln cepat, sederhana dan biaya ringan maka pemberiannya dilakukan dengan cara menunggu para pihak datang untuk mengambilnya, tanpa dipungut biaya dari para pihak untuk menyampaikan akta cerai tersebut.

Nasri Alamsa, sebagai panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang penulis wawancarai pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2010 berpendapat bahwa :¹¹

⁹ Nasri Alamsa, (Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2010

¹⁰ H. Sudirman, (Ketua Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 30 Agustus 2010

“Pelaksanaan pemberian akta cerai adalah tugas dan tanggung jawab panitera sesuai dengan pasal 84 (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, akan tetapi dalam prakteknya sehari-hari Pengadilan Agama Bangkinang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena tidak tersedianya dana atau biaya untuk mengantarkan akta cerai tersebut, tidak dimintanya biaya seperti biaya panggilan para pihak untuk bersidang”.

Bapak mulyadi Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang, penulis wawancara pada hari senen tanggal 20 September 2010 berpendapat bahwa : ¹²

“Pelaksanaan pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang adalah tugas panitera, yang diberikan amanat atau sebagai perpanjangan tangan panitera kepada jurusita, namun hal tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 karena tidak adanya biaya untuk mengantarkan akta cerai tersebut kepada pihak yang bersangkutan, sebagaimana adanya biaya pemberitahuan sidang kepada pihak yang berperkara”.

Berdasarkan uraian pendapat ketua Pengadilan Agama Bangkinang dan panitera Pengadilan Agama Bangkinang di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemberian akta cerai kepada pihak yang bersangkutan tidak di antarkan oleh panitera seperti yang tercantum dalam pasal 84 (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang durubah

¹¹ Nasri Alamsa, (Panitera Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2010

¹² Mulyadi, (Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang) *Wawancara*, tanggal 20 September 2010

dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, akan tetapi di jemput oleh para pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama Bangkinang tersebut.

Namun, pihak yang bersangkutan juga merasa kesulitan dalam mengambil akta cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang, di sebabkan karena biaya, rata-rata penghidupan mereka pas-pasan untuk makan saja, dan jarak dari tempat mereka ke Pengadilan Agama Bangkinang cukup jauh, dan pastinya memerlukan biaya, sebab lain juga karena kurang tahu pasti kapan akta cerai tersebut disiapkan.

Secara umum hambatan-hambatan panitera tidak melaksanakan amanat dalam pasal 84 (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang durubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pemberian akta cerai adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang berperkara tidak adanya biaya untuk menjemput akta cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang.
2. Para pihak ada yang tidak diketahui alamatnya (ghaib).
3. Para pihak merasa tidak perlu lagi mengambil akta cerai sebagai bukti cerai karena telah punya isteri yang lan sebelum bercerai (telah menikah dahulu).
4. Para pihak isteri merasa sudah tua dan merasa tidak membutuhkan akta cerai lagi.
5. Para pihak menyuruh orang lain untuk mengambil akta cerai akan tetapi dilengkapi dengan surat kuasa untuk mengambilnya.
6. Belum diatur ketentuan biaya untuk mengantar akta cerai tersebut kepada para pihak sehingga terpaksa akta cerai itu tidak di antarkan kepada para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan solusi dari hambatan-hambatan tidak terlaksananya amanat yang telah diatur dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989, adapun solusi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang tidak mempunyai biaya untuk menjemput akta cerai ke Pengadilan Agama Bangkinang seharusnya pihak pengadilan agama yang ditunjuk untuk mengantarkan akta cerai untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat yang telah diatur dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989, yaitu mengantarkan akta cerai selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara berkekuatan hukum tetap.
2. Bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya oleh pihak Pengadilan Agama Bangkinang, seharusnya pihak pengadilan memberitahukan kepada pihak tersebut lewat media elektronik, seperti radio, televise, dll.
3. Seharusnya kepada Mahkamah Agung untuk mengatur biaya untuk mengantarkan akta cerai kepada pihak yang bersangkutan, agar amanat yang tercantum dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat dilaksanakan dengan baik.

Seandainya akta cerai itu tidak di jemput oleh para pihak yang bersangkutan ke Pengadilan Agama Bangkinang seharusnya memungut biaya untuk mengantarkan akta cerai kepada para pihak sama dengan biaya pemanggilan untuk menghadiri persidangan.

Untuk melaksanakan ini Pengadilan Agama Bangkinang merasa berat untuk memunggut biaya sebelum ada putusan atau KMA dari Menteri Agama tentang biaya untuk mengantarkan akta cerai, sehingga tetap menjadi kendala setiap saat sampai ditemukan jalan pemecahannya.

C. Tinjauan Undang-Undang Tentang Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 84 (4) pemberian akta cerai adalah tugas panitera yang berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Berdasarkan pasal 85 menunjukkan bahwa tugas panitra adalah memberikan dan menyerah, jika terjadi kelalian dalam memberikan atau menyerahkan salinan putusan sebagai yang dimaksud dalam pasal 48, menjadi tanggung jawab panitra yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Untuk lebih jelas dapat dilihat kita lihat penjelasan pasal 85 sebagai berikut; jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh panitra atau pejabat pengadilan lainnya, maka atas kelalaiannya itu, panitra atau pejabat pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Nomor 2 Tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengeluarkan surat asli, salinan, atau turunan penetapan putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara yang diperiksa dan diputuskan, tidak diperkenankan dengan cap pegawai dan NIP dibawah nama Hakim, panitra, panitra pengganti, juru sita ataupun juru sita pengganti.

Dalam pasal 84 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang menyangkut dengan kewajiban panitera mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selambat-lambatnya 30 hari yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia/ disediakan untuk itu, hal ini tidak akan terasa berat dan tidak menjadi kendala karena dalam ayat 1 tersebut hanya berkewajiban mengirimkan.

Sedangkan akta cerai wajib diberikan secara langsung kepada para pihak atau kuasanya dan tidak boleh dikirimkan melalui pos atau orang lain tanpa ada surat kuasa dari pihak yang berperkara. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk mengantisipasi terjadi masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari. setelah penulis menganalisa permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian akta cerai kepada para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Bangkinang, penulis juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang agar pemberian akta cerai kepada para pihak tepat waktunya, yaitu dengan cara memberitahukan kepada para pihak pencari keadilan pda setiap selesai pembacaan

putusan akhir, ketua majelis/hakim menyampaikan hak dan kewajiban masing-masing, pihak baik pemohon/termohon, dan penggugat/tergugat serta kuasanya, apabila mereka merasa tidak puas dengan keputusan itu ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan jika tidak merasa puas dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta.

Kemudian pihak-pihak yang merasa puas dengan keputusan tersebut dengan arti tidak banding diberitahukan bahwa surat bukti cerainya (akta cerai) dapat diambil di kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Pengadilan ketua majelis.

Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Zuriati, S. Ag panitera pengganti di Pengadilan Agama Bangkinang mengatakan bahwa, cara untuk mudah dalam penyampaian akta cerai adalah dengan cara diberitahukan kepada para pihak pencari keadilan pada setiap selesai pembacaan putusan akhir, ketua majelis/hakim menyampaikan hak dan kewajiban masing-masing, termasuklah hak untuk mengambil bukti cerainya (akta cerai) ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan waktu yang telah ditentukan.¹³

Dengan usaha yang telah dilakukan tersebut, belum banyak membantu pemberian akta cerai dengan cepat seperti yang dikehendaki oleh pasal 84 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

¹³ Zuriati, (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangkinang), *Wawancara*, tanggal 21 September 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian akta cerai menurut Undang-undang Nomor 7 pasal 84 ayat 4 bahwa, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti kepada para pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Adapun pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bangkinang yang sesuai dengan Undang-undang tersebut hanya 30% dari jumlah keseruhan akta cerai yang akan diberikan, yaitu 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan, hal tersebut belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 84 ayat 4.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian akta cerai adalah karena belum di aturnya biaya untuk mengantarkan akta cerai tersebut kepada para pihak sehingga akta cerai itu tidak dapat diantarkan kepada para pihak. Hambatan lain adalah karena jarak antara Ibukota Kabupaten yaitu Bangkinang tempat kedudukan Pengadilan Agama sangat berjauhan dengan desa-desa yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang.
3. Berdasarkan tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 84 (4) pemberian akta cerai

adalah tugas panitera yang berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

B. Saran

Guna untuk mengakhiri skripsi ini, penulis akan mencoba memberikan saran-saran, mudah-mudahan dapat menjadi nilai tambah bagi Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bangkinang dalam rangka mengemban tugas-tugas di bidang yuridistira dimasa mendatang.

Adapun saran-saran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kiranya lembaga yang terkait, DPR bersama Presiden supaya meninjau ulang kembali kalimat “Memberikan” menjadi “Mengirimkan” dalam Undang-undang No 7 tahun 1989, sehingga akta cerai dapat dikirimkan kepada para pihak pencari keadilan dengan cara surat dinas (perbaikan Undang-undang No 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989).
2. Karena luasnya wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang perlu kiranya mengajukan kepada pemerintah baik daerah maupun pusat dalam hal ini Mahkamah Agung agar dapat mengalokasikan dana dalam bentuk biaya perjalanan dinas untuk mengantarkan akta cerai kepada para pihak pencari keadilan supaya tidak memberatkan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan agar penetapan biaya mengantarkan akta cerai ini diatur melalui

Keputusan Menteri Agama (KMA) atau setidaknya ditetapkan melalui instruksi Menteri Agama Republik Indonesia.

3. Kepada Mahkamah Agung untuk mengatur biaya untuk mengantarkan akta cerai kepada pihak yang bersangkutan, agar amanat yang tercantum dalam pasal nomor 84 ayat 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Jakarta, Pranada Media, , 2005
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Daud Ali, *Undang- Undang* , Jakarta : Panji Masyarakat. No. 634 tanggal 1-10 Januari
- Depag RI, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan di Indonesia*, Jakarta : proyek depag, 1985
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Idris Ramulyo, M, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hill Co
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit liberty, Yogyakarta, 1988
- Taufiq Hamami, Artikel Utama “*Ikhtisar Sejarah di Indonesia “Mimbar Hukum*, No 59 Tahun XIV 2003, Penerbid Al Hikmah dan Dabinpera Islam
- Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan
- UUD 1945 RI pasal 24 (2)
- Pedoman Teknis Administradi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, 2009
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Panitera Pengadilan (Tugas, Fungsi, Dan Tanggung Jawab) Cet-Ke 4* (Proyek Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Dan Non Hakim Mahkamah Agung RI. 2004)
- Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983

WAWANCARA PENELITIAN

1. Berapa banyak perkara cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2009?
2. Berapa banyak perkara yang telah diputuskan oleh Hakim pada tahun 2009?
3. Berapa banyak Akta Cerai yang telah disampaikan kepada yang pihak bersangkutan pada tahun 2009?
4. Apakah dalam penyampaian akta cerai telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989?
5. Apa yang menjadi kendala terjadinya tidak tepat waktu dalam menyampaikan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang kepada pihak yang bersangkutan?
6. Apakah ada uang transportasi dari pengadilan dalam penyampaian akta cerai kepada pihak yang bersangkutan?
7. Berapa hari akta cerai sampai kepada bapak/ibu setelah berkekuatan hukum tetap?
8. Apakah ada pungutan biaya dari panitera yang mengantarkan akta cerai kepada bapak/ibu?

BIOGRAFI



Khairul Akmal, Lahir di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 03 Mei 1988 dari sepasang suami istri Azhari dan Umi Salma. Anak ke dua dari empat bersaudara.

Pendidikan formal SD 016 Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan menerus pendidikan ke Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang Selama 6 tahun. Dan setelah itu meneruskan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Strata SI. Pada tahun 2010/2011 telah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan judul karya ilmiah “***Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)***” dengan Indeks Prestasi sangat memuaskan (3.40).